

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 46

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
(RUSUNAWA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan dalam rangka penataan Kota serta pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Kota Cimahi dengan lahan yang

terbatas, maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);

- c. bahwa agar pengelolaan RUSUNAWA dapat berjalan secara efektif dan efisien serta penghuniannya tepat sasaran, maka dipandang perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1247);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan – satuan yang masing – masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, selanjutnya disingkat RUSUNAWA;
6. Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
7. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun;
8. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai

tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum;

9. Pengelolaan RUSUNAWA adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
10. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi digunakan bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama;
11. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pedoman agar dapat memenuhi tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan RUSUNAWA;
2. Agar pengelolaan RUSUNAWA berjalan secara konsisten dan dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan Aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 3

Kegiatan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa meliputi :

- a. Administratif, meliputi pencatatan pendaftaran keluar masuk penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa secara lengkap, menerima pembayaran uang sewa dan iuran lainnya, menerima/mencatat laporan dari penghuni untuk diteruskan kepada yang berwenang;
- b. Melakukan pengamanan dan penertiban mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian Rusunawa dari hal – hal yang tidak diinginkan;
- c. Kebersihan, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- d. Pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar;
- e. Pemeliharaan hunian meliputi komponen - komponen bangunan yang ada pada unit hunian, blok bangunan sampai pada komponen yang ada pada lingkungan Rusunawa;
- f. Perbaikan meliputi kerusakan – kerusakan yang ada pada unit hunian, blok bangunan serta yang ada pada komponen lingkungan Rusunawa;
- g. Pembinaan terhadap penghuni RUSUNAWA.

Bagian kedua Lembaga

Pasal 4

- (1) Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa dibentuk dan diangkat serta diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota;

- (2) Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pengelola Rusunawa

Pasal 5

Tugas Pokok dan fungsi, sebagai berikut :

1. Menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyusun anggaran untuk kegiatan pengelolaan yang diusulkan melalui kepala/manajer badan pengelola;
3. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik, dan air bersih);
4. Melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan;
5. Melaksanakan kegiatan penyewaan, penanganan pelanggan, pembinaan, penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan;
6. Melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan pemasaran dan promosi untuk tercapainya tingkat hunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya;

9. Melaporkan kepada Walikota secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya;

BAB IV

STATUS PENGHUNIAN, PERSYARATAAN PENGHUNI/PENYEWA, HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Pertama Status Penghunian

Pasal 6

1. Unit hunian : Satuan rumah susun sederhana sewa (Sarusunawa).
2. Pemilik Rusunawa : Pemerintah Daerah.
3. Penghuni : Penyewa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dalam perjanjian yang disetujui
4. Masyarakat penghuni : Seluruh warga penghuni rusunawa menjadi anggota organisasi / paguyuban penghuni.
5. Pengelola : Lembaga/badan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan Penghuni/Penyewa

Pasal 7

- (1) Status :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Belum memiliki rumah/Tempat tinggal dibuktikan surat keterangan dari Pemerintah setempat / Lurah;
 - c. Pekerja/pengusaha yang berpenghasilan tetap menengah kebawah atau masyarakat tertentu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
- (2) Mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Pengelola Rusunawa.
- (3) Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan.
- (4) Bersedia mentaati dan memenuhi Tata Tertib / ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan

Bagian Ketiga Hak Penghuni

Pasal 8

Penghuni berhak :

1. Menempati 1 (satu) unit hunian untuk tempat tinggal;
2. Menggunakan/memakai fasilitas barang dan benda bersama;
3. Mendapat layanan keamanan dan kenyamanan tempat dalam lingkungan hunian;
4. Menyampaikan keberatan / laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
5. Mendapat fasilitas air bersih, penerangan, dan jasa kebersihan;

6. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;
7. Mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
8. Mendapat pengembalian uang jaminan pada saat mengakhiri hunian setelah diperhitungkan seluruh kewajiban yang belum dipenuhi.

Bagian Keempat Kewajiban Penghuni

Pasal 9

Penghuni diwajibkan :

1. Membayar uang jaminan sebesar 3 bulan sewa dimuka, uang sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membayar rekening listrik, air bersih, dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur;
4. Memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama sebaik-baiknya;
5. Melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
6. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
7. Bersedia mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola;

8. Mengosongkan/menyerahkan tempat hunian dalam keadaan baik kepada pengelola pada saat perjanjian penghunian berakhir;
9. Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap, kepada Pengelola dalam waktu 1 x 24 jam;
10. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan Pengelola secara berkala
11. Membayar retribusi parkir bagi penghuni / tamu yang meletakkan kendaraannya di area Rusunawa yang telah ditetapkan;
12. Menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis.

Bagian Kelima Tarif Sewa

Pasal 10

Besarnya Tarif Sewa Rusunawa akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan persetujuan DPRD.

BAB V

TATA TERTIB HUNIAN

Pasal 11

Tata tertib hunian Rusunawa akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama Sanksi

Pasal 12

- (1) Apabila penyewa melanggar ketentuan larangan dan kewajiban maka perjanjian sewa dapat dibatalkan secara sepihak dan uang jaminan penghuni menjadi hak pengelola;
- (2) Penyewa dalam tempo 1 (satu) bulan belum menghuni, uang jaminan dipotong oleh pengelola sebesar 20%;
- (3) Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab penghuni;
- (4) Tidak membayar uang sewa unit hunian selama 1 bulan harus keluar;
- (5) Tidak membayar rekening listrik dan air bersih, sampai pada tanggal yang ditetapkan dilakukan pemutusan sementara oleh pengelola;
- (6) Bagi penghuni yang ternyata penghasilannya sudah meningkat/melebihi batas maksimum ketentuan, diharuskan meninggalkan tempat huniannya (sudah tidak termasuk kelompok sasaran Rusunawa);
- (7) Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa - menyewa dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian, pengelola dapat meminta bantuan Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 13

- (1). Apabila penghuni dan atau penyewa dengan nyata – nyata tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melakukan perbuatan yang merugikan pemilik asset atau lembaga pengelola Rusunawa serta tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah ini maka diancam dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah sewa yang tertunggak;
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidikan

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah / diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pelanggaran dalam Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Pelanggaran dan Penghunian Rumah susun sederhana sewa;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pelanggaran Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Pelanggaran Penghunian Rumah susun sederhana sewa;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana Pelanggaran Rumah Susun Sederhana Sewa;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Pelanggaran Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dengan huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
- i. Menghentikan penyidikan;
- j. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa, menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH
KOTA CIMAHI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Sedar', is written over a long, thin horizontal line that extends from the left margin towards the center of the page.

M O H . S E D A R

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2004 NOMOR 46 SERI D